

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

SKRIPSI

**KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR
KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA
SELATAN : PERBANDINGAN SEBELUM DAN
SESUDAH PEMEKARAN.**



Diajukan Oleh :

**Andrew Mayson M M L
01023120046**

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2009**

389.207
May
e-091559
2009

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**



SKRIPSI

**KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR
KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA
SELATAN : PERBANDINGAN SEBELUM DAN
SESUDAH PEMEKARAN.**



Diajukan Oleh :

**Andrew Mayson M M L
01023120046**

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2009**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ANDREW MAYSON M M L
NIM : 01023120046
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
MATA KULIAH : EKONOMI REGIONAL
JUDUL SKRIPSI : KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN DI
PROPINSI SUMATERA SELATAN : PERBANDINGAN
SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN.

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

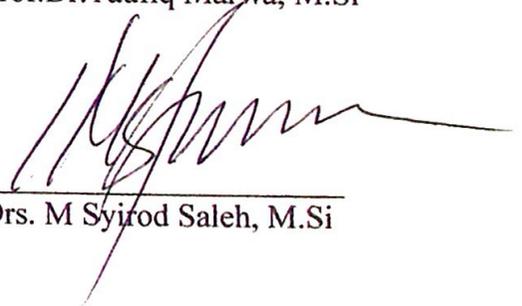
TANGGAL : 9 November 2009

KETUA

: 
Prof. Dr. Taufiq Marwa, M.Si

TANGGAL : 10 November 2009

ANGGOTA

: 
Drs. M Syirod Saleh, M.Si

TANDA PERETUJUAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

NAMA : ANDREW MAYSON M M L
NIM : 01023120046
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
MATA KULIAH : EKONOMI REGIONAL
JUDUL SKRIPSI : KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN
DI PROPINSI SUMATERA SELATAN : PERBANDINGAN
SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN.

Telah diuji di depan panitia ujian komprehensif pada tanggal 24 juli 2009 dan telah memenuhi syarat untuk diterima

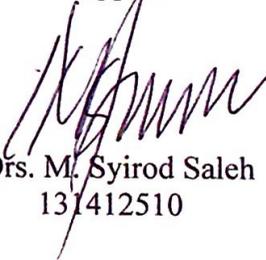
Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya 24 juli 2009

Ketua



Prof. Dr. Taufiq Marwa, Msi
132050493

Anggota



Drs. M. Syirod Saleh
131412510

Anggota



Drs. Nazeli Adenan, Msi
131801648

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Prof. Dr. Taufiq Marwa, Msi
132050493

Hidupku Hanya Sebatas Coretan Tangan Tuhanku

*Skripsi ini kupersembahkan
untuk kedua Orang Tuaku
dan adik – adikku.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmatNya lah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi ini mengambil judul **Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Di Propinsi Sumatera Selatan : Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Pemekaran**. Penulisan skripsi ini dibagi kedalam enam bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Gambaran Umum, Bab V Analisis, Bab VI Kesimpulan dan Saran.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran – pemekaran kabupaten maupun kota yang ada di Sumatera Selatan semakin memperburuk kondisi ketimpangan pendapatan yang ada di Sumatera Selatan. ketimpangan ini disebabkan oleh karena beberapa daerah yaitu daerah – daerah yang baru di mekarkan atau dibentuk masih belum dapat memanfaatkan potensi ekonomi daerahnya secara maksimal jika dibandingkan dengan daerah – daerah yang sudah berdiri sebelumnya, perbedaan jumlah penduduk dan perbedaan tingkat PDRB yang dimiliki oleh tiap kabupaten juga merupakan hal –hal yang menyebabkan memburuknya ketimpangan pendapatan di Sumatera Selatan.

Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan – kebijakan terutama dalam pemekaran suatu daerah, dan juga menjadi bahan masukan bagi para penulis yang ingin meneliti lebih lanjut tentang ketipangan pendapatan.

Penulis

Andrew Mayson M M L

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Di Propinsi Sumatera Selatan : Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Pemekaran.” Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam – dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain :

1. Prof. Dr. Badia Parizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Syamsurizal, AK, Dekan Fakultas Ekonomi Iniversitas Sriwijaya
3. Prof. Dr. Taufiq Marwa, Msi, Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan sekaligus Pembimbing I Skripsi.
4. Drs. M Syirod Saleh, Pembimbing II Skripsi.
5. Kedua Orang Tuaku tercinta dan saudara – saudaraku yang telah memberikan dukungan moril dan pendanaan.
6. Staf Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang mejadikan semua urusan lancar.
7. Teman – teman seangkatan di Jurusan Ekonomi pembangunan facultas ekonom Universitas Sriwijaya, Joseph, Mitha, Faisal, Ariyadi, terimakasih untuk senyuman dan canda tawa serta semangat yang selalu ada.
8. Teman –teman di kontrakan, Daniel, Very, Maria, terimakasih untuk semangat dan canda tawa serta senyuman yang kalian berikan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang kalian berikan.

Penulis

Andrew Mayson M M L

DAFTAR ISI

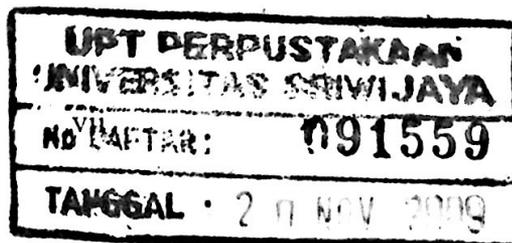
Judul.....	i
Pengesahan Skripsi	ii
Persetujuan panitia Skripsi.....	iii
Moto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terimakasih	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
Abstract.....	xiv
Abstraksi	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan masalah	15
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori.....	17
--------------------------	----



2.1.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi	17
2.1.2. Teori Ketidakseimbangan Pertumbuhan Wilayah	18
2.1.3. Distribusi pendapatan	19
2.1.4. Faktor – faktor Penyebab Terjadinya Ketimpangan Ekonomi Regional	21
2.2. Penelitian Terdahulu	23
2.3. Alur Pikir	24
2.4. Hipotesis	25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian.....	26
3.2. Data dan Metode Pengumpulan Data	27
3.3. Metode Analisis Data.....	27
3.3.1. Index Entropi Theil	27
3.4. Batasan Operasional Variable.....	29

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1. Letak Geografi dan Wilayah Administrasi Propinsi Sumsel	30
4.2. Penduduk.....	33
4.3. Pendapatan Perkapita	38

BAB V ANALISIS

5.1. Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten / Kota
di Propinsi Sumsel 42

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan 49
6.2. Saran 50

DAFTAR PUSTAKA..... 52

LAMPIRAN..... 54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Banyak Desa dan Kelurahan Menurut Kabupaten / Kota di Propinsi Sumatera Selatan.2002	5
Tabel 1.2. Banyak Desa dan Kelurahan Menurut Kabupaten / Kota di Propinsi Sumatera Selatan.2006	6
Tabel 1.3. PDRB Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten / Kota, 1997 – 2000 (Jutaan Rupiah) Dengan Minyak Bumi dan Gas.....	7
Tabel 1.4..PDRB Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten / Kota, 1997 – 2000 (Dalam Persen) Dengan Minyak Bumi dan Gas.....	8
Tabel 1.5. PDRB Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten / Kota, 2001 – 2006 (Jutaan Rupiah) Dengan Minyak Bumi dan Gas.....	9
Tabel 1.6. PDRB Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten / Kota, 2001 – 2006 (Dalam Persen) Dengan Minyak Bumi dan Gas.....	11
Tabel 1.7. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan (Dalam Persen) Periode 1997 – 2000	13
Tabel 1.8. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan (Dalam Persen) Periode 2001 – 2006	14
Tabel 4.1. Luas daerah Menurut Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Selatan. (KM ²) 2006	32
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten / Kota di Propinsi Sumatera Selatan 2006.....	33
Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Sumatera Selatan Menurut Jenis Kelamin 2006	35
Tabel 4.4. Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Kabupaten / Kota di Propinsi Sumatera Selatan 2006.....	36

Tabel 4.5. Penduduk Berumur 15 Tahun Menurut Jenis Kegiatan di Propinsi Sumatera Selatan 2002 – 2006	37
Tabel 4.6. PDRB Perkapita Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten / Kota 1997 – 2000.....	38
Tabel 4.7. PDRB Perkapita Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten / Kota 2001 – 2006.....	40
Tabel 5.1. Ketimpangan Pendapatan di Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1997 – 2000	43
Tabel 5.2. Ketimpangan Pendapatan di Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 – 2006	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.Kurva Lorenz	20
Gambar 4.1. Luas Wilayah Menurut Kabupaten / Kota di Propinsi Sumatera Selatan 2006.....	31
Gamabar 5.1.Grafik indeks entropi Theil Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1997 – 2000	43
Gamabar 5.2.Grafik indeks entropi Theil Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 – 2006	44

DAFTAR LAMPIRAN

1. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten / Kota di Propinsi Sumatera Selatan 2006	55
2. Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Kabupaten / Kota di Propinsi Sumatera Selatan 2006.	56
3. Peduduk Berumur 15 Tahun Menurut Jenis Kegiatan di Propinsi Sumatera Selatan 2002 – 2006.	57
4. PDRB Perkapita Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten / Kota 1997 – 2000.....	57
5. PDRB Perkapita Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten / Kota 2001 – 2006.....	58
6. PDRB Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten / Kota, 1997 – 2000 (Jutaan Rupiah) Dengan Minyak Bumi dan Gas	69
7. PDRB Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten / Kota, 2001 – 2006 (Jutaan Rupiah) Dengan Minyak Bumi dan Gas.....	60
8. Indeks Entropi Theil 2000	61
9. Indeks Entropi Theil 1999	62
10. Indeks Entropi Theil 1998	63
11. Indeks Entropi Theil 1997	64
12. Indeks Entropi Theil 2001	65
13. Indeks Entropi Theil 2002	66
14. Indeks Entropi Theil 2003	67
15. Indeks Entropi Theil 2004	68
16. Indeks Entropi Theil 2005	69
17. Indeks Entropi Theil 2006	70

ABSTRACT

The goals of this research are to know the condition of the regional inequality between the regions in South Sumatera before and after the expansion of some regions, observed from the population and the Gross Regional Domestic Product.

The Data used in this research are secondary data 'time series' in ten years period of observation (1997 – 2006), the data are taken from the South Sumatera Statistical center committee. The Instrument that is used in this research is the Theil Entropi Index.

The conclusion of this research is that the inequality that happens after the expansion or some regions is getting worst if we compare to inequality that happens before the expansion. That can be explained by seeing the average of the entropi theil index that getting worst after the expansion. The average of the entropi theil index before the expansion reach the number of 0,000000971, and the average of the entropi theil index after the expansion is 0,000001829. the inequality is said getting worst because of that the number of the average of the entropi theil index after the expansion getting worst in other word it moving left the zero point if we compare to the average of the entropi theil index that shown in the period before the expansion.

The research that has been done come with hopes that the academicians can use it as a reference if they want to do an advance research about the regional inequality, and for the policy maker to use it as a review to take a better policy particularly in the policy of the expansion.

ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketimpangan pendapatan antar kabupaten / kota sebelum dan sesudah terjadinya pemekaran di Sumatera Selatan, ditinjau dari aspek Produk Domestik regional Bruto dan Jumlah penduduk.

Data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 'time series' dalam kurun waktu sepuluh tahun pengamatan (1997 – 2006), data yang digunakan diambil dari Biro Pusat Statistik propinsi Sumatera Selatan. Alat analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Entropi Theil.

Dari penelitian ini diperoleh bahwa tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi sesudah adanya pemekaran beberapa Kabupaten / Kota semakin memburuk atau dengan kata lain semakin timpang. Hal tersebut terlihat dari Indeks Entropi Theil rata – rata yang semakin memburuk sesudah adanya pemekaran, indeks entropi theil sebelum adanya pemekaran adalah sebesar 0,000000971 dan sesudah adanya pemekaran menjadi 0,000001829. Ketimpangan pendapatan dikatakan semakin memburuk karena angka ketimpangan sesudah adanya pemekaran semakin menjauhi angka nol jika dibandingkan dengan angka ketimpangan yang ada sebelumnya (sebelum adanya pemekaran).

Diharapkan penelitian yang dilakukan ini dapat menjadi bahan referensi bagi para akademisi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terhadap ketimpangan pendapatan, serta menjadi bahan masukan bagi para pengambil kebijakan untuk pengambilan kebijakan pembangunan daerah yang lebih merata.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pembangunan di Indonesia bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan masyarakat dengan cara peningkatan pendapatan. Dalam hal ini Indonesia telah mengalami banyak kemajuan, “ upaya dalam mengurangi penduduk di bawah garis kemiskinan dalam dua dekade terakhir mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Jumlah orang miskin di Indonesia telah turun dari 70.000.000 jiwa pada tahun 1970 menjadi menjadi 23.000.000 jiwa pada tahun 1995”. (Remi & Tjiptoherijanto 2002 :1) Sementara itu suara pembaruan mengatakan “ jumlah penduduk miskin di Indonesia diperkirakan bertambah satu juta menyusul terjadinya tsunami di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara. Data *Asian Development Bank* (ADB) menyebutkan jumlah tersebut bertambah dibandingkan tahun sebelumnya, penduduk miskin di Indonesia mencapai 37.000.000 jiwa. Padahal, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah orang msikin pada tahun 2004 turun sekitar satu persen dibanding tahun sebelumnya, yakni 36,2 juta jiwa atatu 16,6 persen dari total penduduk Indonesia.” Ditempat lain tempo mengatakan “menurut menteri Negara Pencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta, saat ini angka kemiskinan masih mencapai 17,75 persen...” sedangkan menurut data dari BPS di Sumatera Selatan tingkat Kemiskinan rumah tangganya mencapai angka 638.181 pada tahun 2005 – 2006.

Sama halnya dengan propinsi – propinsi lain yang ada di Indonesia, Sumatera Selatan dibagi menjadi kabupaten dan kota, kabupaten dan kota tersebut dibagi lagi menjadi kecamatan – kecamatan, dan selanjutnya kecamatan – kecamatan dibagi lagi menjadi desa – desa dan kelurahan – kelurahan.

Sesuai dengan pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain, dan daerah otonomi dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah jika dipandang sesuai dengan perkembangan daerah. Munculnya gejala, bahkan kenyataan akan adanya pemekaran dan pembentukan kabupaten, kota, dan propinsi baru di Indonesia menuntut perlunya segera ditetapkan syarat – syarat dan kriteria yang menjadi pertimbangan didalam pembentukan dan pemekaran daerah.

Pemerintah telah menetapkan syarat – syarat dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah yang tertuang dalam peraturan pemerintah No. 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah. Dalam PP No.129 tahun 2000 tersebut diuraikan bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kehidupan berdemokrasi, meningkatkan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, meningkatkan pengelolaan potensi wilayah, dan meningkatkan keamanan dan ketertiban daerah, serta meningkatkan hubungan yang serasi antara daerah dan pusat.

Dalam PP No. 129 tahun 2000 itu juga tercantum syarat – syarat pembentukan daerah dengan aspek penilaian sebagai berikut :

- a. Kemampuan Ekonomi;
- b. Potensi daerah;
- c. Sosial budaya;
- d. Sosial politik;
- e. Jumlah penduduk;
- f. Luas daerah;
- g. Pertimbangan lain yang memungkinkan terlaksananya otonomi daerah.

Sesuai dengan pasal 4 peraturan pemerintah No. 129 tahun 2000 tersebut yang dimaksudkan dengan kemampuan ekonomi adalah cerminan hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung di suatu daerah propinsi, Kabupaten/Kota yang dapat diukur : (a) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (b) Penerimaan daerah sendiri. Sedang yang dimaksud dengan potensi daerah sendiri seperti yang diatur dalam pasal 5 adalah merupakan tersedianya sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dan dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dari : (a) lembaga keuangan, (b) sarana ekonomi, (c) sarana Pendidikan, (d) sarana kesehatan, (e) sarana transportasi dan ekonomi, (f) sarana pariwisata, (g) ketenaga kerjaan. Sementara yang dimaksud dengan sosial budaya diatur dalam pasal 6 yaitu yang merupakan cerminan yang berkaitan dengan struktur sosial dan pola budaya masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat yang dapat diukur dari : (a) tempat peribadatan, (b) tempat kegiatan Institusi sosial dan budaya, (c) sarana olahraga. Sosial politik merupakan kondisi sosial politik masyarakat yang dapat diukur dari : (a) partisipasi masyarakat dalam berpolitik, (b) organisasi kemasyarakatan, hal ini diatur dalam pasal 7. Jumlah penduduk adalah jumlah tertentu penduduk suatu daerah. Pertimbangan lain

merupakan pertimbangan untuk terselenggaranya otonomi daerah yang dapat diukur dari : (a) keamanan dan ketertiban, (b) ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan, (c) rentang kendali, (d) propinsi yang akan dibentuk minimal terdiri dari tiga kabupaten dan kota, (e) kabupaten yang akan dibentuk minimal terdiri dari tiga kecamatan, (f) kota yang akan dibentuk minimal terdiri dari tiga kecamatan.

Sejak tahun 2001, wilayah administrasi Sumatera Selatan yang semula terdiri dari enam kabupaten dan satu kota, tidak termasuk Bangka Belitung dan Pangkal Pinang yang sudah memekarkan diri menjadi suatu propinsi baru pada tahun 2000, mengalami pemekaran menjadi tujuh kabupaten dan empat kota. Satu kabupaten baru tersebut adalah kabupaten banyuasin yang merupakan wilayah pecahan dari kabupaten Musi Banyuasin. Sedangkan tiga kota yang baru terbentuk adalah kota Prabumulih yang merupakan pecahan dari kabupaten Muara Enim, kota Pagaralam yang merupakan pecahan dari Kabupaten Lahat, dan kota Lubuk Linggau yang merupakan pecahan dari kabupaten Musi Rawas.

Jumlah desa di Sumatera Selatan tahun 2001 adalah sebanyak 2.428 dan kelurahan sebanyak 280. dan jumlah kecamatan sebanyak 143 kecamatan. Dengan jumlah penduduk pertengahan tahun sebanyak 7.110.900 jiwa, maka rata-rata kepadatan per kilometer persegi adalah 71 jiwa.

Sampai akhir tahun 2005, wilayah administrasi Sumatera Selatan mengalami pemekaran kabupaten dan kota, sekarang jumlah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan menjadi sepuluh kabupaten dan empat kota. Tiga kabupaten baru tersebut adalah Ogan Komering Ulu dan Ogan Komering Ulu Timur dengan kabupaten induk Ogan Komering

Ulu dan kabupaten Ogan Ilir yang merupakan pecahan dari kabupaten Ogan Komering Ilir (mekar pada tahun 2004).

Jumlah desa di Sumatera Selatan tahun 2005 sebanyak 20596 desa dan kelurahan sebanyak 295 kelurahan, dan jumlah kecamatan adalah 180 kecamatan.

Tabel di bawah ini akan memberikan gambaran tentang wilayah administrasi propinsi Sumatera Selatan pada tahun 2002.

Tabel 1.1.
Banyak Desa dan Kelurahan Menurut Kabupaten / Kota di
Propinsi Sumatera Selatan.
2002

No	Kabupaten / Kota	Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Ogan Komering Ulu	478	25	503
2	Ogan Komering Ilir	417	30	447
3	Muara Enim	255	18	273
4	Lahat	506	21	528
5	Musi Rawas	254	4	257
6	Musi Banyuasin	197	5	202
7	Banyuasin	235	10	245
8	Palembang	1	102	103
9	Prabumulih	14	12	26
10	Pagar Alam	71	13	84
11	Lubuk Linggau	0	40	40
Jumlah / Total		2.428	280	2.708

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Selatan, Sumatera Selatan Dalam Angka 2002.

Sementara tabel 1.2. berikut ini menggambarkan tentang wilayah administrasi propinsi Sumatera Selatan pada tahun 2006.

Tabel 1.2.
Banyak Desa dan Kelurahan Menurut Kabupaten / Kota di
Propinsi Sumatera Selatan.
2006

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Kecamatan	Daerah		
			Perkotaan	Pedesaan	Jumlah
1	Ogan Komering Ulu	11	15	141	156
2	Ogan Komering Ilir	18	19	274	293
3	Muara Enim	19	21	279	300
4	Lahat	19	22	508	530
5	Musi Rawas	17	-	261	261
6	Musi Banyuasin	11	5	200	205
7	Banyuasin	11	11	251	262
8	OKU Selatan	10	5	200	205
9	OKU Timur	17	12	253	265
10	Ogan Ilir	16	12	155	167
11	Palembang	14	99	4	103
12	Prabumulih	4	22	15	37
13	Pagar Alam	5	10	25	35
14	Lubuk Linggau	8	42	30	72
Jumlah / Total		180	295	2.596	2.891

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Selatan, Sumatera Selatan Dalam Angka 2006.

Sementara perkembangan PDRB sebelum terjadinya pemekaran akan digambarkan dalam tabel 1.3. berikut ini.

Tabel 1.3.
PDRB Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Kabupaten / Kota, 1997 – 2000 (Jutaan Rupiah)
Dengan Minyak Bumi dan Gas

No.	Kabupaten / Kota	1997	1998	1999	2000
1	Ogan Komering Ulu	1.845.542	2.909.948	3.222.667	3.922.486
2	Ogan Komering Ilir	1.565.760	2.231.605	2.596.179,54	2.916.600
3	Muara Enim	3.258.753	5.203.269	5.950.035	8.658.663
4	Lahat	1.207.933	1.870.650	2.066.280	2.269.180
5	Musi Rawas	1.301.274	2.027.041	2.206.881	2.532.846
6	Musi Banyuasin	3.404.768	5.504.512	6.305.896	8.607.969
7	Palembang	4.670.319	6.809.871,63	7.941.073	9.487.060
Jumlah		17.254.349	26.556.896,63	30.289.011,54	38.394.804

Sumber : BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten / Kota Indonesia, 1997 – 2000.

Pada masa sebelum terjadinya pemekaran yang di gambarkan pada tabel 1.3. diatas dapat kita lihat bahwa PDRB Sumatera Selatan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Penghitungan diatas dilakukan dengan terlebih dahulu telah mengeluarkan PDRB dari Bangka, Belitung, dan Pangkal Pinang yang memisahkan diri dari propinsi Sumatera Selatan dan membentuk Propinsi yang baru. Dari tabel diatas dapat dilihat pada masa sebelum terjadinya pemekaran yang terjadi di beberapa kabupaten dan kota bahwa daerah yang memiliki andil yang paling besar terhadap PDRB yang dimiliki oleh Sumatera Selatan adalah Kota Palembang yang juga berperan sebagai ibu kota Sumatera Selatan, sementara daerah yang paling kecil

menyumbang untuk PDRB tersebut adalah Lahat. Dari tabel itu dapat kita lihat bahwa Palembang menyumbang sebesar 4.670.319 (27,067%) pada tahun 1997 sementara Lahat hanya menyumbang sebesar 1.207.933 (7,001%). Pada tahun berikutnya yaitu tahun 1998 Palembang menyumbang sebesar 6.809.871 (25,643%) sementara Lahat hanya sebesar 1.870.650 (7,044%), pada tahun 1999 Palembang menyumbang sebesar 7.941.073 (26,218%) dan Lahat sebesar 2.066.280 (6,822%), dan pada tahun 2000 Palembang menyumbang sebesar 9.487.060 (24,709%) dan Lahat sebesar 2.269.180 (5,910%).

Tabel 1.4..
PDRB Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Kabupaten / Kota, 1997 – 2000 (Dalam Persen)
Dengan Minyak Bumi dan Gas

No.	Kabupaten / Kota	1997	1998	1999	2000
1	Ogan Komering Ulu	10,696	10,957	10,640	10,216
2	Ogan Komering Ilir	9,075	8,403	8,571	7,596
3	Muara Enim	18,886	19,593	19,644	22,552
4	Lahat	7,001	7,044	6,822	5,910
5	Musi Rawas	7,542	7,633	7,286	6,597
6	Musi Banyuasin	19,733	20,727	20,819	22,420
7	Palembang	27,067	25,643	26,218	24,709
Jumlah		100	100	100	100

Sumber : BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten / Kota Indonesia, 1997 – 2000.

Sementara perkembangan PDRB Sumatera Selatan setelah terjadinya pemekaran beberapa daerah adalah seperti yang digambarkan pada tabel 1.4. berikut ini.

Tabel 1.5.
 PDRB Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku
 Menurut Kabupaten / Kota, 2001 – 2006 (Jutaan Rupiah)
 Dengan Minyak Bumi dan Gas

No.	Kabupaten / Kota	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	OKU	4.617.315	5.025.214	5.528.581,45	2.760.624	3.206.055	3.652.873,00
2	OKU Selatan #)	-	-	-	1.196.785	1.377.810,92	1.683.173,41
3	OKU Timur #)	-	-	-	2.258.104	2.615.546	3.069.108,00
4	OKI	3.484.865	3.886.340	4.330.542,84	3.126.162	3.564.496	4.106.422,00
5	Ogan Ilir #)	-	-	-	1.731.909	1.995.178	2.235.194,00
6	Muara Enim	7.115.845	6.157.875	6.874.888,76	7.683.414	9.825.106,06	13.919.094,00
7	Prabumulih #)	-	1.046.766	1.155.219,56	1.313.980	1.639.235	1.862.464,00
8	Lahat	3.026.567	2.850.476	3.208.296,94	3.592.907	4.204.924,19	3.427.272,00
9	Pagar Alam #)	-	525.721	574.289,35	636.212	715.462,11	793.776,00
10	Musi Rawas	3.285.192	2.617.083	2.937.808,42	3.327.762	4.135.382,93	4.686.125,00
11	Lubuk Linggau #)	-	815.337	905.294,22	1.022.036	1.155.403	1.297.623,00
12	Musi Banyuasin	12.811.508	12.505.302	9.950.941,84	12.046.457	16.962.398	18.963.005,00
13	Banyuasin #)	-	-	4.089.860,18	4.744.340	5.868.648	7.029.269,00
14	Palembang	12.329.627	14.460.830	16.815.477,91	19.287.616	24.595.161,72	29.589.817,00
	Jumlah / Total	46.670.919	49.890.944	56.371.201,47	64.728.308	81.860.806,93	95.587.215,41

Catatan : #) Merupakan pecahan dari kabupaten yang berada di atasnya.

Sumber: Biro Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan



Dalam tabel 1.5. diatas dapat kita lihat bahwa sesudah terjadinya pemekaran di beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Selatan perkembangan PDRB Sumatera Selatan tetap mengalami peningkatan yang signifikan, hal tersebut dapat kita lihat dari jumlah / total PDRB Sumatera Selatan dari tahun ketahun yang semakin meningkat. Tetapi pada tahun 2001 Palembang yang pada tahun – tahun sebelumnya merupakan penyumbang terbesar bagi PDRB Sumatera Selatan hanya menyumbang sebesar 12.329.627 (26,418%), jumlah tersebut lebih kecil dari jumlah yang disumbang oleh kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan penyumbang terbesar pada tahun tersebut yaitu sebesar 12.811.508 (27,451%), dan penyumbang terkecil adalah Lahat yang hanya menyumbang sebesar 3.026.567 (6,485%). Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2002 Palembang kembali menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB Sumatera Selatan dengan menyumbang sebesar 14.460.830 (28,985%) sementara penyumbang terkecil adalah Pagar Alam yang merupakan Kabupaten baru yang merupakan pecahan dari Lahat, Pagar Alam hanya menyumbang sebesar 525.721 (1,054%). Pada tahun 2003 Sumbangan terbesar kembali diberikan oleh Palembang yaitu sebesar 16.815.477,91 (29,830%) dan yang terkecil kembali disumbang oleh Pagar Alam yang menyumbang sebesar 574.289,35 (1,019%). Pada tahun 2004 Palembang menyumbang sebesar 19.287.616 (29,798%), dan Pagar Alam hanya sebesar 636.212 (0,983%). Pada tahun 2005 juga sumbangan terbesar disumbang oleh kota Palembang sebesar 24.595.161,72 (30,045%), dan yang terkecil kembali disumbang oleh Pagar Alam sebesar 715.462,11 (0,874%).

Tabel 1.6.
PDRB Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Kabupaten / Kota, 2001 – 2006 (Dalam Persen)
Dengan Minyak Bumi dan Gas

No.	Kabupaten / Kota	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	OKU	9,893	10,072	9,807	4,265	3,916	3,856
2	OKU Selatan ^{#)}	-	-	-	1,849	1,683	1,778
3	OKU Timur ^{#)}	-	-	-	3,489	3,195	3,241
4	OKI	7,467	7,790	7,682	4,830	5,137	4,337
5	Ogan Ilir ^{#)}	-	-	-	2,676	2,437	2,361
6	Muara Enim	15,247	12,343	12,196	11,870	12,002	13,931
7	Prabumulih ^{#)}	-	2,098	2,049	2,030	2,002	1,967
8	Lahat	6,485	5,713	5,691	5,551	5,137	3,619
9	Pagar Alam ^{#)}	-	1,054	1,019	0,983	0,874	0,838
10	Musi Rawas	7,039	5,246	5,212	5,141	5,052	4,949
11	Lubuk Linggau ^{#)}	-	1,634	1,606	1,579	1,411	1,370
12	Musi Banyuasin	27,451	25,065	17,653	18,611	20,721	20,027
13	Banyuasin ^{#)}	-	-	7,255	7,330	7,169	7,424
14	Palembang	26,418	28,985	29,830	29,798	30,045	31,249
Jumlah / Total		100	100	100	100	100	100

Catatan : #) Merupakan pecahan dari kabupaten yang berada di atasnya.

Sumber : BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten / Kota Indonesia, 2001 – 2005.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan sebelum dan sesudah pemekaran akan dijelaskan dengan penjelasan berikut ini. Pada tahun 1997, pada semester pertama tahun 1997, akselerasi pertumbuhan dari pola pertumbuhan tahun lalu masih terus berlanjut yakni sebesar 8,2 %. Stabilitas ekonomi terus terpelihara dengan

baik, yang ditunjukkan oleh laju inflasi yang hanya 2,8%. Memasuki awal semester kedua tahun 1997, yaitu pada akhir juni 1997, nilai tukar rupiah tercatat Rp. 2.450 per dollar, di akhir juli melemah pada level Rp. 2.528 per dollar Amerika dan terus melorot hingga Rp.3.700 per dollar pada akhir 1997.

Gejolak nilai tukar rupiah tersebut, menimbulkan krisis di sektor moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi. Fenomena – fenomena tersebut mengakibatkan melemahnya berbagai aktifitas ekonomi di Sumatera Selatan. Secara keseluruhan tahun 1997, pertumbuhan ekonomi daerah Sumatera Selatan melemah hingga hanya 4,1 persen dari sekitar 8,0 persen pada tahun lalu. Hal ini terutama disebabkan oleh hanya krisis moneter, yang kemudian meluas menjadi krisis ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 1998 mencapai titik terendah yaitu sebesar negatif 7,92 persen. Hal ini akibat dari pengaruh krisis ekonomi yang terlihat sejak awal semester kedua tahun 1997.

Pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang dilihat dari kenaikan PDRB tahun 1999 meningkat menjadi sebesar 3,17 persen. Pada tahun 2000, seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional, propinsi Sumatera Selatan juga mengalami proses pemulihan ekonomi, hal tersebut dapat dilihat dari semakin stabilnya perekonomian Sumatera Selatan pada tahun tersebut, secara keseluruhan perekonomian Sumatera Selatan pada tahun 2000 bertumbuh sebesar 5,92 persen naik dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 3,17 persen.

Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan selama periode tahun 1997 sampai dengan 2000 (sebelum terjadinya pemekaran di Sumatera Selatan) dapat di gambarkan dalam tabel 1.5. berikut ini.

Tabel 1.7.
 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan (Dalam Persen)
 Periode 1997 – 2000.

Tahun	Pertumbuhan (%)
1997	4,10
1998	- 7,92
1999	3,17
2000	5,92

Sumber : BPS, Sumatera Selatan Dalam Angka 1997 – 2000.

Pada tahun 2001 pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan mengalami perlambatan yaitu turun pada tingkat 4,11 persen. Faktor yang menjadi penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2001 tersebut karena aktifitas ekonomi pada beberapa sektor seperti sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan maupun bangunan agak lebih lambat dibandingkan aktifitas tahun 2000.

Pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan adalah sebesar 3,76 persen, nilai tersebut mengalami penurunan dari nilai pertumbuhan tahun sebelumnya. Pada tahun 2003 pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan kembali mengalami peningkatan yaitu mencapai level tingkat pertumbuhan sebesar 4,52 persen. Pada tahun 2004, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan adalah sebesar 4,63 persen, kemudian pada tahun 2005 bertambah mencapai tingkat 4,84 persen. Pada tahun 2006, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai pertumbuhan sebesar 4,84 persen, tetapi tahun 2006 menjadi 5,20 persen.

Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada periode 2001 sampai dengan 2006 (sesudah terjadinya pemekaran) akan di gambarkan dalam tabel 1.6. berikut ini.

Tabel 1.8.
Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan (Dalam Persen)
Periode 2001 – 2006

Tahun	Pertumbuhan (%)
2001	4,11
2002	3,76
2003	4,52
2004	4,63
2005	4,84
2006	5,20

Sumber : BPS, Sumatera Selatan Dalam Angka 2001 – 2006.

Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan dapat dikatakan cukup baik, karena dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, kecuali hanya dalam tahun 2002 dan 1998 yang mengalami penurunan pertumbuhan.

Perkembangan PDRB Sumatera Selatan yang digambarkan diatas memang mengalami trend yang semakin meningkat tiap tahunnya baik sebelum dan setelah pemekaran beberapa kabupaten, dan dalam hal ini Sumatera Selatan telah mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Terlepas dari keberhasilan Sumatera Selatan dalam meningkatkan pendapatan daerahnya yang digambarkan dengan perkembangan PDRB

yang meningkat setiap tahunnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dari tahun ke tahun, masih ada satu masalah lagi yang perlu diperhatikan, yaitu masalah ketimpangan pendapatan yang terdapat di Sumatera Selatan itu sendiri, dan jika kita kaitkan dengan pemekaran yang terjadi di Sumatera Selatan akan muncul suatu pertanyaan, apakah peningkatan PDRB yang diikuti oleh pemekaran beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Selatan diikuti oleh membaiknya distribusi pendapatan atau malah distribusi pendapatan yang ada di Sumatera Selatan tersebut semakin memburuk?

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan maslah dalam penelitian ini adalah bagaimana keadaan ketimpangan pendapatan antar kabupaten / kota di Sumatera Selatan sebelum dan sesudah terjadinya pemekaran beberapa kabupaten / kota.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan masalah yang diuraikan diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ketimpangan pendapatan antar kabupaten / kota sebelum dan sesudah terjadinya pemekaran.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini akan menjadi bahan kajian dasar dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penulis lain yang ingin melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai ketimpangan pendapatan.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan – kebijakannya terutama dalam hal pemekaran suatu daerah.

Daftar Pustaka

- Akita, Takahiro. "Decomposing Regional Income Inequality in China and Indonesia Using Two-Stage Nested Theil Decomposition Method." Springer-Verlag : The Annals Of Regional Science (2003) 37 : 55 – 57.
- Asmaniaty.2006. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Identifikasi Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir (OI) Sumsel*. Skripsi tidak dipublikasikan. Palembang : Universitas Sriwijaya.
- Biro Pusat Statistik Sumatera Selatan, 2002. *Ogan Komering Ilir Dalam Angka*. BPS Sumatera Selatan Palembang.
- Biro Pusat Statistik Sumatera Selatan, 2001. *Ogan Komering Ilir Dalam Angka*. BPS Sumatera Selatan Palembang.
- Biro Pusat Statistik Sumatera Selatan, 2006. *Ogan Komering Ilir Dalam Angka*. BPS Sumatera Selatan Palembang.
- Biro Pusat Statistik Sumatera Selatan, 2003. *Ogan Komering Ilir Dalam Angka*. BPS Sumatera Selatan Palembang.
- Biro Pusat Statistik Sumatera Selatan, 2004. *Ogan Komering Ilir Dalam Angka*. BPS Sumatera Selatan Palembang.
- Biro Pusat Statistik Sumatera Selatan, 2005. *Ogan Komering Ilir Dalam Angka*. BPS Sumatera Selatan Palembang.
- Biro Pusat Statistik Sumatera Selatan, 1997. *Ogan Komering Ilir Dalam Angka*. BPS Sumatera Selatan Palembang.
- Biro Pusat Statistik Sumatera Selatan, 1998. *Ogan Komering Ilir Dalam Angka*. BPS Sumatera Selatan Palembang.
- Biro Pusat Statistik Sumatera Selatan, 1999. *Ogan Komering Ilir Dalam Angka*. BPS Sumatera Selatan Palembang.
- Biro Pusat Statistik Sumatera Selatan, 2004. *Ogan Ilir Dalam Angka*. BPS Sumatera Selatan Palembang.
- Biro Pusat Statistik Sumatera Selatan, 2005. *Ogan Ilir Dalam Angka*. BPS Sumatera Selatan Palembang.
- Biro Pusat Statistik Sumatera Selatan, 2006. *Ogan Ilir Dalam Angka*. BPS Sumatera Selatan Palembang.

- Biro Pusat Statistik Sumatera Selatan, 2000. *Laporan Perekonomian Sumatera Selatan*. BPS Sumatera Selatan, Palembang.
- Budi, Kurniasih. 2006. *Penduduk Miskin Indonesia 5 persen Pada 2005*, (<http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2006/12/18/brk.2006121889656.id.html>, diakses 10 maret 2008).
- Comcecião, Pedro, dan Ferreira Pedro. "The Young Person's Guide to The Theil Index : Suggesting Intuitive Interpretation and Exploring Analytical Applications." UTIP Working Paper (2004) 14.
- Hasibuan, Nrimansjah. (1993). *Pemerataan dan Pembangunan Ekonomi*. Palembang : Penerbit Universitas Sriwijaya.
- Panorama, Maya. 2002. *Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten / Kota di Sumsel*, Tesis Tidak di Publikasikan. Palembang : Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya.
- Remi, Sotyastie Soemitro, dan Tjiptoherijanto, Prijono. (2002). *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia. (Suatu Analisis Awal)*. Jakarta : Asdi Mahsatya.
- Rostartina, Eka dan Maya Panorama. "Ketimpangan Pembangunan di Sumatera Selatan." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, Vo 6, No 1 (Pebruari 2004) : 48 – 59.
- Setiono, Benny. 2006. *Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten / Kota di Sumatera Selatan*. Skripsi Tidak di Publikasikan. Palembang : Universitas Sriwijaya.
- Sukrino, Sadono. 2001. *Pengantar Ekonomi Makro*. Edisi Kedua. Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Tadjoeddin, Mohammad Zulfan, SuharyoWdjajanti I, dan Mishra, Satish. "Aspirasi Terhadap Katidakmerataan : Disparitas Regional dan Konflik Vertikal di Indonesia." UNSFIR (2001) : Working Paper : 01/01 – I.
- Tarigan, Robinson. 2001. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Yadiansyah. 2007. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Propinsi di Indonesia Periode 1993 – 2005*. Skripsi tidak dipublikasikan. Palembang Universitas Sriwijaya.
- _____, 2005. *Penduduk Miskin di Indonesia Menjadi 37 Juta Orang*, (<http://www.suarapembaruan.com/News/2005/01/29/index.html>, diakses 10 maret 2008).